



# Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2016

## “Model Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Desa”

Didik G. Suharto 0007117402 | Suharsono (0001075102) | Kristina Setyawati (0013066303) | Faizatul Ansoriyah (0004038202)

### Latar Belakang

Isu tentang kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang mendesak untuk terus menerus dan segera diselesaikan. Realitasnya, penduduk miskin di Indonesia selalu didominasi oleh masyarakat desa. Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan juga lebih parah daripada di daerah perkotaan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan ke desa belum mampu menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Secara khusus penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi model pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan desa.

### Metode

Penelitian difokuskan di Desa Krasak Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan diskusi dengan pakar untuk data primer, serta teknik dokumentasi untuk data sekunder. Untuk data kuantitatif dianalisis dengan teknik tabel tunggal (single-tab), sedangkan untuk data kualitatif dianalisis secara mendalam dengan teknik deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahap; yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing.

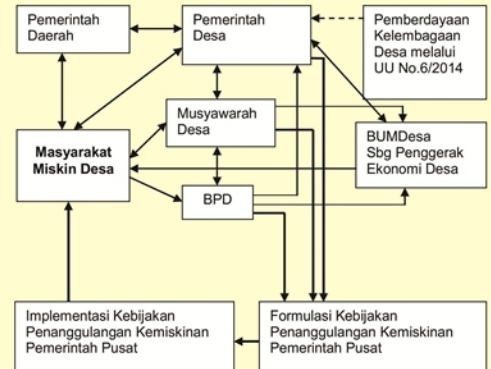
### Hasil

- Kemiskinan di Kabupaten Boyolali masih menjadi persoalan serius meskipun indikator kinerja lembaga pemerintahan kabupaten secara umum bernilai baik. Artinya, pembangunan daerah selama ini belum berhasil menanggulangi kemiskinan.
- Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengacu pada strategi kebijakan nasional. Kebijakan/program penanggulangan kemiskinan cenderung bersifat rutin, parsial, dan kurang mampu memberikan daya ungkit bagi penanggulangan kemiskinan desa.
- Penanggulangan kemiskinan desa berkaitan dengan sinergitas dan peran antara desa dan pemerintahan supra desa. Secara teoritis penting untuk memperbaiki dan memperkuat local administrative and political structure dan potensi kekuatan sumberdaya manusia (human-actors) pemerintah desa maupun masyarakat desa.
- Pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan desa pada prinsipnya mendayagunakan komponen-komponen atau unsur-unsur dalam pemerintah desa untuk secara bersama-sama menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat desa. Lembaga desa yang diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



### Kesimpulan

- Pemerintah daerah dituntut memiliki komitmen tinggi bagi penanggulangan kemiskinan desa, melalui kebijakan/program yang relevan, holistik, sinergis dan berkelanjutan.
- Kebijakan/program perlu berperspektif lokal dengan mengarahkan strategi pada penyelesaian akar masalah kemiskinan di desa, tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas atau pola dari pemerintah pusat.
- Pengambil kebijakan di pemerintah tingkat atas dan stakeholder desa harus memberikan kesempatan bagi desa untuk membangun dan memfasilitasi masyarakat untuk berdaya.
- Optimalisasi lembaga pemerintah desa dengan cara memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
- Pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa dilakukan dengan memanfaatkan potensi desa dan masyarakat desa.



Gambar: Model Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Desa

### Kontak

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta